

Nama: Azwaliza

Npm: 2213031007

Studi Kasus pertemuan 9

Kebijakan Making Indonesia 4.0, yang diluncurkan pada 2018, bertujuan merevitalisasi industri manufaktur melalui digitalisasi dan inovasi di lima sektor prioritas (makanan-minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia). Namun, setelah lima tahun, pertumbuhan sektor ini belum signifikan—kontribusi manufaktur terhadap PDB stagnan di sekitar 19-20%, lebih rendah dari target 25% pada 2030. Berdasarkan teori-teori kebijakan industri seperti teori negara pembangunan (developmental state) oleh Chalmers Johnson dan Alice Amsden, teori kebijakan industri fleksibel (industrial policy) oleh Dani Rodrik, serta teori keunggulan komparatif (comparative advantage) oleh David Ricardo, penyebab kegagalannya dapat dianalisis sebagai berikut:

- **Kurangnya Kapasitas Negara Pembangunan (Developmental State):**
Teori developmental state menekankan peran negara yang kuat dalam mengarahkan industrialisasi melalui koordinasi pemerintah-swasta dan investasi strategis. Di Indonesia, kapasitas ini lemah karena birokrasi yang korup dan inefisien, serta kurangnya koordinasi antar-kementerian (misalnya, antara Kemenperin dan Kemenkeu). Kebijakan Making Indonesia 4.0 lebih bersifat top-down tanpa mekanisme eksekusi yang kuat, berbeda dari model Korea Selatan yang memiliki badan khusus seperti Economic Planning Board. Akibatnya, alokasi anggaran (Rp500 triliun) tidak optimal, dengan banyak program terhenti di tahap perencanaan.
- **Fleksibilitas Kebijakan yang Rendah (Industrial Policy Theory):**
Rodrik menyarankan kebijakan industri yang fleksibel, berbasis evidence, dan disesuaikan dengan tantangan lokal. Making Indonesia 4.0 terlalu kaku, fokus pada teknologi tinggi (IoT, AI) tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan SDM. Sektor prioritas seperti elektronik masih bergantung pada impor komponen, dan kurangnya pilot project yang sukses membuat kebijakan gagal beradaptasi. Teori ini menjelaskan bahwa kebijakan yang tidak responsif terhadap kegagalan (misalnya, hambatan FDI) memperburuk deindustrialisasi dini, di mana manufaktur Indonesia kalah bersaing dengan negara seperti Vietnam.
- **Pengabaian Keunggulan Komparatif dan Tantangan Struktural:**
Ricardo menekankan eksploitasi keunggulan komparatif, tetapi Indonesia gagal memanfaatkan potensi lokal seperti tenaga kerja murah dan pasar domestik besar. Sebaliknya, kebijakan ini terlalu ambisius pada high-tech tanpa membangun fondasi seperti infrastruktur (jalan, listrik) yang buruk, atau SDM terampil (hanya 10-15% tenaga kerja manufaktur terampil). Faktor eksternal seperti pandemi dan perang dagang juga memperburuk, tetapi kebijakan tidak cukup antisipatif. Secara keseluruhan, kegagalan ini mencerminkan "jebakan middle-income" di mana Indonesia terjebak

antara negara berkembang dan maju, dengan manufaktur yang tidak kompetitif.

Penyebab ini saling terkait, menghasilkan pertumbuhan industri yang stagnan, sementara negara seperti Vietnam tumbuh 7-8% per tahun di sektor manufaktur.

Perbandingan Pendekatan Kebijakan Industri Indonesia dengan Negara Lain seperti Vietnam atau Korea Selatan

Pendekatan Indonesia dalam Making Indonesia 4.0 lebih reaktif dan kurang terintegrasi dibandingkan dengan Vietnam dan Korea Selatan, yang menunjukkan efektivitas lebih tinggi dalam menghindari deindustrialisasi dini. Berikut perbandingan:

Perbedaan efektivitas terletak pada kapasitas eksekusi: Vietnam sukses karena kebijakan yang pragmatis dan pro-investor, sementara Korea Selatan melalui kontrol negara yang ketat dan investasi strategis. Indonesia kalah karena kebijakan yang ambisius tapi tidak didukung infrastruktur dan koordinasi, membuatnya rentan terhadap persaingan global.

Rancangan Kebijakan Industri Alternatif yang Lebih Kontekstual untuk Indonesia

Berdasarkan analisis, kebijakan alternatif harus lebih kontekstual, menggabungkan elemen developmental state (koordinasi kuat), industrial policy fleksibel (adaptasi lokal), dan comparative advantage (eksploitasi potensi domestik). Saya rancang kebijakan bernama "Indonesia Industri Inklusif 4.0" (I3), yang fokus pada revitalisasi manufaktur melalui pendekatan bottom-up, inklusif, dan berkelanjutan, dengan target peningkatan kontribusi manufaktur ke 25% PDB dalam 10 tahun.

- **Rasional:** Kebijakan ini mengatasi kegagalan Making Indonesia 4.0 dengan memprioritaskan kesiapan lokal (SDM, infrastruktur) dan inklusi SMEs, sambil menghindari jebakan deindustrialisasi melalui diversifikasi rantai nilai. Mengadopsi model Vietnam (fleksibilitas FDI) dan Korea Selatan (investasi SDM), tetapi disesuaikan dengan konteks Indonesia—keragaman regional, pasar domestik besar, dan tantangan lingkungan—untuk mencapai pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.
- **Instrumen Kebijakan Utama:**
 - **Penguatan Kapasitas Negara:** Bentuk badan koordinasi nasional (seperti Economic Development Board) untuk mengintegrasikan kebijakan antar-kementerian, dengan fokus pada monitoring berbasis data (big data industri). Alokasikan anggaran 1% PDB untuk program ini, dengan transparansi tinggi untuk mengurangi korupsi.

- **Investasi SDM dan Pendidikan Vokasi:** Implementasikan sistem apprenticeship seperti Korea Selatan, dengan kemitraan universitas-perusahaan. Berikan beasiswa dan pelatihan digital untuk 500.000 pekerja per tahun, dengan target 30% tenaga kerja manufaktur terampil pada 2030.
- **Infrastruktur dan FDI Fleksibel:** Bangun SEZ di daerah strategis (misalnya, Jawa Timur untuk otomotif, Sulawesi untuk kimia) dengan insentif FDI seperti tax holiday 10 tahun untuk investor yang terintegrasi dengan rantai nilai lokal. Adopsi model Vietnam dengan prioritas green manufacturing untuk ekspor berkelanjutan.
- **Dukungan SMEs dan Inovasi Lokal:** Berikan subsidi 20-30% untuk SMEs yang mengadopsi teknologi hijau dan digital, dengan fokus pada sektor prioritas yang disesuaikan lokal (misalnya, tekstil ramah lingkungan di Jawa Barat). Dorong kolaborasi dengan startup untuk inovasi, seperti platform digital untuk rantai pasokan.
- **Evaluasi dan Adaptasi:** Lakukan review tahunan berdasarkan indikator seperti pertumbuhan ekspor dan penciptaan lapangan kerja, dengan mekanisme penyesuaian jika gagal (misalnya, pivot ke sektor baru seperti baterai kendaraan listrik).

Kebijakan ini diharapkan lebih efektif karena kontekstual—mengintegrasikan kekuatan lokal sambil belajar dari sukses global—dan dapat mendorong pertumbuhan manufaktur 5-7% per tahun, keluar dari jebakan deindustrialisasi. Implementasi memerlukan komitmen politik jangka panjang.